

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Chidir, 2001, *Pengertian – Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, Mandar Maju
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas – Asas Wigati Indonesia*.
- Fransiska Nona Kartika, 2012, *Analisis Mengenai Kuasa Menjual Dalam Akta Pengakuan Hutang*, Penelitian ini dilaksanakan oleh Fransiska Nona Kartika, Tesis, Program Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada
- Mantay, borbir, 2006, *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*, Medan, Pustaka Press.
- Meliala, Qiram Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.
- Otopia ,Nexxon, 2013, *Grosse Akta Pengakuan Utang Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soebekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- , 1978, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Widjaja, Gunawan, 2003, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Darii Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo.



B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindehan Hak Atas Tanah